BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pasar Modal

Negara maju memiliki empat pasar modal diantaranya Pasar Perdana, Bursa Efek, *Over The Counter* (OTC), dan *Electronic Communication Network* (ECN)**.** Dari keempat pasar modal tersebut Indonesia hanya mempunyai dua pasar modal yaitu pasar perdana dan bursa efek. Pasar modal (*capital market*) di Indonesia dimulai ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan Bursa Efek Batavia pada akhir tahun 1912. Awalnya kemunculannya adalah karena adanya keinginan untuk memobilisasi dana masyarakat. Menurut Rusdin (2008;1) menyatakan bahwa pasar modal yaitu

> "Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya."

Berikut pengertian pasar modal menurut Martono dan Agus Harjito (2003;359) adalah sebagai berikut:

> "Pasar Modal adalah suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang baik hutang maupun modal sendiri diperdagangkan. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat (dalam pengertian fisik) yang terorganisasi di mana surat berharga (efek-efek) diperdagangkan, Adanya pasar modal ini yang kemudian disebut Bursa Efek"

Adanya pasar modal ini sangat membantu dalam melakukan berbagai aktivitas perekonomian terutama bagi perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar. Selain itu, perusahaan yang ingin melakukan perdagangan efek harus melalui pasar modal. Pasar modal ini kemudian disebut Bursa Efek.

2.1.2 Laporan Keuangan

Perusahaan yang telah terdaftar (*listing)* di Bursa Efek Indonesia telah mempunyai laporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai peranan penting dalam menjelaskan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pemakai atau pengguna informasi. Oleh karena itu, perusahaan yang telah Go Publik harus menyajikan laporan keuangan yang relevan dengan kebutuhan informasi. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008;105) menyatakan bahwa:

> "Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu."

Menurut Martono dan Agus Harijito (2003;51) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

> "Laporan keuangan (*financial statement*) merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan pada suatu perusahaan pada saat tertentu"

Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan dibutuhkan oleh berbagai pihak baik intern maupun ekstern. Oleh karena itu, perusahaan telah menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan stándar akuntansi yang berlaku. Artinya perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan telah mengikuti sistem

atau proses akuntansi. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008;4) laporan keuangan berisi hal- hal sebagai berikut:

”1. Daftar Neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu. Neraca menggambarkan posisi harta, utang, dan modal pada tanggal tertentu.
2. Perhitungan Laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Laba rugi menggambarkan hasil yang diterima perusahaan selama suatu periode tertentu serta biaya- biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut serta Albania.
3. Laporan sumber sumber penggunaan dana. Disini dimuat sumber dana dan pengeluaran perusahaan selama satu periode. Dana bisa diartikan kas bisa juga modal kerja.
4. Laporan arus kas, laporan ini merupakan ikhtisar Arus Kas masuk dan Arus Kas keluar yang dalam format laporannya dibagi dalam kelompok-kelompok kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002;2) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

> “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian intergral dari laporan”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, laporan keuangan merupakan laporan yang menjelaskan berbagai informasi keuangan yang disajikan untuk pihak yang berkepentingan.

Penggunaan laporan keuangan merupakan faktor terpenting bagi pemakainya dalam melakukan analisis, penilaian, pengukuran dan berbagai hal lainnya, yang nantinya akan berfungsi sesuai kebutuhan pengguna laporan keuangan. Menurut pendapat Sofyan Syafri Harahap pengguna laporan keuangan tersebut dibagi menjadi

6 pengguna diataranya pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, investor, kreditur dan banker, pemerintahan dan regulador serta analis, akademis, pusat data bisnis. Dari klasifikasi pengguna laporan keuangan yang dikemukakan tersebut maka, investor merupakan pemakai yang membutuhkan laporan keuangan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008;7) pengguna laporan keuangan untuk investor adalah sebagai berikut:

> "Bagi investor, laporan keuangan dimaksudkan untuk:
> 1. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan;
> 2. Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan
> 3. Menilai kemungkinan menanamkan divestasi (menarik investasi) dari perusahaan
> 4. Menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan dimasa datang."

Pemakai laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (PSAK 2002;2.3) adalah sebagai berikut:

> "Pemakai Laporan keuangan meliputi investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor, usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda."

Dari pemaparan diatas, laporan keuangan yang berisi data keuangan merupakan aspek penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini berperan dalam pengambilan keputusan dan dapat digunakan dalam menjelaskan aktivitas ekonomi perusahaan dalam bentuk pertanggungjawaban kepada pihak pemilik modal (*stakeholders*), pemberi pinjaman (*debtholders, kreditor* dan *bonholders)* serta masyarakat (sosial).

2.1.3 Kewajiban

Dalam laporan keuangan terdapat laporan neraca, laporan neraca menggambarkan posisi harta, hutang dan modal pada tanggal tertentu atau per periode akuntansi. Harta dalam neraca bisa disebut dengan aktiva yang terbagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Harta ini diperoleh dari sumber hutang dan modal artinya keberadaan harta di perusahaan bergantung pada adanya pembiayaan lewat hutang ataupun modal baik modal yang disetor pemilik ataupun laba ditahan. Hutang dalam neraca bisa disebut dengan kewajiban yang terdiri dari hutang jangka panjang maupun jangka pendek Kewajiban ini mengalami perkembangan yang terus menerus. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008;109) sebaga berikut"

> " Menurut APB pengertian kewajiban adalah kewajiban ekonomis dari suatu perusahaan yang diakui dan dinilai sesuai prinsip akuntansi. Kewajiban disini termasuk juga saldo kredit yang ditunda yang bukan merupakan utang atau kewajiban."

Adanya perkembangan mengenai kewajiban maka FASB juga mendefinisikan kewajiban adalah sebagai berikut:

> "kemungkinan pengorbanan kekayaan ekonomis dimasa yang akan datang yang timbul akibat kewajiban perusahaan sekarang untuk memberikan harta atau memberikan jasa kepada pihak lain dimasa yang akan datang sebagai akibat suatu transaksi atau kejadian yang sudah terjadi."

Kewajiban yang sering disebut dengan kewajiban lancar salah satunya adalah hutang. Menurut Donald E Kieso.dkk (2002;179) kewajiban lancar adalah

"Kewajiban yang likuidasinya diperkirakan secara layak memerlukan penggunaan sumber daya yang ada yang di klasifikasikan sebagai aktiva lancar, atau penciptaan kewajiban lancar lain."

Dari definisi diatas dapat memberikan penjelasan kewajiban dalam hal ini hutang, memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dan merupakan aktivitas yang tidak bisa dihindari oleh perusahaan.

2.1.4 *Leverage*

2.1.4.1 Pengertian *Leverage*

Hutang pada perusahaan sering digambarkan dengan *leverage.* Oleh karena itu, *leverage* membantu baik investor dan perusahaan untuk investasi dan beroperasi.

Leverage menurut Martono dan D. Agus Harjito (2008;295) menyatakan bahwa:

> "*Leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan *asset* dan sumber dana (*sourch of funds)* oleh perusahaan dimana dalam penggunaan *asset* atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Penggunaan *asset* (aktiva) atau dana tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham."

Menurut Agus Sartono (2001;257) *leverage* adalah sebagai berikut:

"Penggunaan asset dan sumber dana (*sourch of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham."

Dari kedua pengertian mengenai *leverage* maka disimpukan bahwa perusahaan dalam melakukan pembiayaan dengan maksud meningkatkan keutungan

harus melakukan pembayaran/atau pengembalian atas sumber dana yang diperoleh. Contohnya apabila perusahaan berada pada kondisi buruk perusahaan yang tidak ter*leverage* masih menghasilkan laba tetapi perusahaan yang menggunakan hutang menderita rugi sehingga tingkat pengembalian atas ekuitasnya negatif (sumber; J Fred Weston dan Eugene F Brigham). Hal tersebut mengakibatkan perusahaan berada pada kondisi yang buruk sehingga mengakibatkan adanya resiko masa depan perusahaan.

2.1.4.2 Rasio *Leverage*

Ibarat alat pendongkrak, utang bisa membuat pertumbuhan sebuah perusahaan menjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan hanya mengandalkan modalnya sendiri. Namun, jika terlalu besar nilai hutang yang sama juga bisa membuat kondisi keuangan perusahaan kepayahan atau menjadi tidak sehat. Karenanya, investor perlu mempelajari rasio *leverage* yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Pada umumnya rasio dapat mnyederhanakan hubungan antara bagian tertentu dengan bagian lainnya. Rasio ini biasa disebut dengan rasio keuangan. Rasio menurut Irham Fahmi (2006;51) menyatakan bahwa

> "Rasio (ratio) disebut sebagai perbandingan jumlah. Dari satu jumlah dengan jumlah lainnya itulah dilihat perbandingannya dengan harapan akan ditemukan jawaban yang selanjutnya dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan."

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008;297) Rasio keuangan adalah sebagai berikut:

> "Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan."

Dalam rasio keuangan *leverage* merupakan salah satu jenis rasio keuangan yang dibutuhkan untuk menggambarkan hubungan hutang dan ekuitas. Rasio hutang terhadap ekuitas ini dapat menilai perusahaan dalam menggunakan uang pinjaman. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008;306) rasio *leverage* adalah

> "rasio yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity).*"

Dari kedua teori rasio diatas maka rasio merupakan alat ukur dalam melakukan analisis keuangan. Menurut Darsono dan Ashari (2005;77) yang menyatakan bahwa jenis-jenis rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

"1. DAR
2. DER
3. EM
4. IC."

Dari jenis rasio diatas, maka rasio leverage yang digunakan adalah debt to equity ratio dengan pertimbangan bahwa rasio ini merupakan rasio yang paling umum dan merupakan rasio yang relevan dengan penelitian karena untuk mengetahui sejauh mana penggunaan uang yang dipinjam. Komponen yang terdapat dalam *debt to equity ratio* merupakan kewajiban perusahaan yang dibayar dengan modal sendiri dan dapat menunjukan secara langsung kemampuan perusahaan dalam membayar

kewajiban jangka panjangnya. Menurut Kamandi (1993) yang dikutip oleh John Halim (2005;24) menyatakan bahwa

> ”*Debt to equity ratio* merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, yang ditujukan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar keseluruhan hutang.”

Sedangkan menurut Darsono dan Ashari (2005;24) *debt to equity ratio* yang menyatakan bahwa:

> ”*Debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio ini menunjukan persentase penyedia dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham”

Perhitungan dalam fenomena menggunakan rumus dari rasio leverage yaitu *debt to equity ratio* menurut Sofyan Syafri harahap (2008;307) adalah sebagai berikut:

Debt to Equity Ratio (DER) ⇨ $\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100$

2.1.5 *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Perusahaan *Go Public* pada dasarnya harus menciptakan *image* yang baik bagi masyarakat pada umumnya dan *debtholders/*kreditor atau investor khususnya. Untuk mendapatkan sumber dana perusahaan harus melakukan perbaikan dalam berbagai bidang. Dengan adanya *go public* ini membuat perusahaan baik data keuangan manupun non keuangan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (sosial). Untuk

itu perusahaan dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban sosialnya. Pertanggungjawaban sosial ini sering dikenal dengan *corporate social responsibility*. Kemunculan konsep mengenai *Corporate Social Responsibility* sudah sejak lama. Karena adanya *Sustainable development* yang dirumuskan oleh *The World Comission on Environment and Development* maka, *Corporate Social Responsibility* mengalami perkembangan yang terus menerus. H.R Bowen berpendapat Dalam Ismail Solihin (2009;1) bahwa

> "Para pelaku bisnis memiliki kewajiban untuk mengupayakan suatu kebijakan serta membuat keputusan atau melaksanakan berbagai tindakan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat."
>
> Menurut Ismail Solihin (2009; 1) menyatakan bahwa
>
> "Pendapat Bowen tersebut telah memberikan kerangka dasar bagi pengembangan konsep tanggung jawab sosial *(social responsibility*).

Dari definsi ini maka dapat dirumuskan bahwa adanya *corporate social responsibility* akan terus menerus mengalami perubahan sejalan dengan adanya perusahaan yang semakin banyak. *Corporate social responsibility* merupakan bagian dari solusi untuk menangulangi berbagai masalah sosial.

2.1.5.1 Pengertian *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Menurut Hendrik Budi Untung (2008;1) *corporate social responsibility* adalah sebagai berikut:

> "Komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribursi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan."

Menurut Pearce dan Robinson dalam alih bahasa Kiroyan (2006;54) menyatakan *corporate social responsibility* adalah

> "Konsep bahwa perusahaan harus melayani masyarakat sosial sebaik memberikan keuntungan financial kepada pemegang saham dan harus berkelanjutan secara terus menerus yang pada akhirnya para manajer akan menyadari bahwa keputusan untuk menerapkan c*orporate social responsibility* adalah keputusan yang sangat penting dalam perencanaan strategis."

Kaitan c*orporate social responsibility* dijelaskan dalam PSAK No.1 (revisi 1988) paragragraf 09, yaitu sebagai berikut:

> "Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup, laporan nilai tambah, khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting"

Dengan demikian, maka *corporate social responsibility* merupakan komitmen perusahaan untuk melaporkan aktivitasnya baik secara ekonomi, sosial ataupun lingkungan sebagai bentuk kesadaran akan tanggung jawab.

2.1.5.2 Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Menurut Hendrik Budi Untung (2008;6) manfaat c*orporate social responsibility* bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

> "1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan

2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
7. memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator
9. Meningkatkan semangat dan productivitas karyawan
10. Peluang mendapatkan penghargaan"

Manfaat c*orporate social responsibility* dapat mengurangi berbagai resiko bisnis, menciptakan kesadaran akan lingkungan serta tanggung jawab sosial yang mengakibatkan adanya kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap pelaku bisnis serta dapat menarik para *debtholders* dan investor untuk memberikan sumber dana yang besar.

2.1.5.3 Jenis-Jenis *Corporate Social Responsibility*

Corporate social responsibility merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab ini di bagi menjadi 3 bagian. Menurut Post (2002; 69); dalam Ismail Solihin; (2009;3) menyatakan bahwa

> "Secara simultan perusahaan akan menjalankan tiga jenis tanggung jawab yang berbeda- beda kepada pemangku kepentingan, di mana ketiga jenis tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara seimbang. Penekanan kepada salah satu jenis tanggung jawab saja akan menyebabkan perusahaan berjalan secara tidak optimal.Ketiga jenis tanggung jawab tersebut mencakup:economic responsibility, legal responsibility dan social responsibility"

Menurut Ismail Solihin (2009; 3) ketiga jenis tanggung jawab perusahaan tersebut memiliki cakupan sebagai berikut:

> "1. *Economic Responsibility*
> Perusahaan korporasi dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan laba secara optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, para pengelola perusahaan koorporasi memiliki tanggung jawab ekonomi diataranya kepada para pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba. Selain memiliki tanggung jawab ekonomi kepada para pemegang saham, perusahaan koorporasi juga memiliki tanggung jawab ekonomi kepada para kreditor yang telah menyediakan pinjaman bagi perusahaan. Pengelola perusahaan korporasi memiliki tanggung jawab dalam bentuk menyisihkan sebagian kas perusahaan untuk membayar cicilan pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang jatuh tempo.
> 2. *Legal Responsibility*
> Kendati perusahaan korporasi didirikan untuk menghasilkan laba, akan tetapi dalam melaksanakan operasi perusahaannya korporasi harus mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.
> 3. *Social Responsibility*
> Tanggung jawab ketiga yang harus dijalankan perusahaan adalah tanggung jawab sosial perusahaan."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa selain kepada para pemegang saham maka, perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap kreditor dalam hal ini yang telah menyediakan pinjaman bagi perusahaan. Pihak yang telah memberikan pinjaman selain kreditor juga para *debtholders.* Investor dalam hal ini memiliki kaitan dikarena pada proses penanaman modal ke perusahaan akan timbul kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pengembalian berupa dividen.

2.1.5.4 Item *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Item pengungkapan (*disclosure*) merupakan unsur penting dalam memperoleh informasi mengenai elemen yang diungkapakan yaitu *corporate social responsibility* di suatu perusahaan. Dalam jurnal Akuntansi 19 dijelaskan bahwa pengungkapan

sosial perusahaan bersifat sukarela (*voluntary disclosure)* tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Pengungkapan (*disclosure)* didefinisikan oleh Hendriksen (1996) dalam jurnal Akuntansi 19 yaitu sebagai berikut:

> "Pengungkapan (*disclosure*) adalah penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian optimal pasar modal secara efisien.

Selain itu dalam jurnal Bisnis dan Akuntansi laporan tahunan (Annual Report) dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu pengungkapan secara wajib dan pengungkapan secara sukarela. Berdasarkan hasil wawancara pada Bursa Efek Indonesia untuk perusahaan yang *Go Publik* dalam hal pelaksanaan *corporate social responsibility* merupakan laporan yang tidak diwajibkan untuk dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia. Hal ini termasuk kedalam pengungkapan sukarela oleh perusahaan. Adanya pengungkapan secara sukarela ini membuat perusahaan harus mempunyai inisiatif dalam melaksanakan *cooperate social responsibility*. Meskipun corporate social responsibility merupakan suatu hal yang tidak diwajibkan tetapi perusahaan yang melaksankan *corporate social responsibility* merasa mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat (sosial). Item pengungkapan yang dilakukan dalam *corporate social responsibility* menurut Eddy Rismanda Sembiring, jurnal MAKSI vol.6.No 1.2006 adalah sebagai berikut:

> "Lingkungan, Energi, Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat serta umum"

Item pengungkapan diatas dapat disimpulkan dengan dimulai dari lingkungan, energi, tenaga kerja, produk dan masyarakat serta umum. Item pengungkapan ini memiliki cakupan yang cukup luas dilihat dari kategori pengungkapan tersebut karena terkait dengan aspek lingkungan dan aspek sosial termasuk dalam hal ini masyarakat. Dalam Penelitian ini menggunakan 6 item pengungkapan yang terdiri dari Lingkungan, Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat serta umum. Pengambilan 6 item ini karena relevan dengan penelitian pada perusahaan manufaktur.

Dalam item pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki pengukuran. Pengukuran ini yang mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu Yosefa Sayekti (2007) dikutip dalam Sembiring (2005), yang mengelompokan pengungkapan termasuk dalam kategori tersebut diatas. Total item pengungkapan berkisar antara ≤ 78 tergantung dari jenis perusahaan. Menurut Yosefa Sayekti yang dikutip dari Hanifah et all (2005) yaitu sebagai berikut:

> ”Untuk menghitung CSRI pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian di beri nilai 1 jika diungkapkan, dan diberi nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan”

Menurut Hanifah et all (2005), rumus perhitungannya adalah sebagai berikut

$$CSRIj = \frac{(\Sigma Xij)}{\text{nj}}$$

Keterangan:

CSRIj : CSR Disclosur

nj : Jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤ 7

Xij : *dummy* Var; 1 jika *Item* i diungkapkan

0; jika *item* i tidak diungkapkan.

2.1.5.5 Hukum yang Mengatur Mengenai Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*

Hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan corporate social responsibility yang terkait dengan penelitian ini adalah Undang-undang perseroan terbatas dan undang-undang investasi. hukum yang mengatur adalah sebagai berikut:

A. Tinjauan Dalam Undang Perseroan Terbatas

Menurut Hendrik Budi Untung (2008; 13) Undang- undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas

> ”Perseroan terbatas adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- undang ini serta peraturan pelaksanaannya.“

Undang- undang No. 74 Tahun 2007 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tentang Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

Ayat (2) menyatakan bahwa:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Ayat (3) menyatakan bahwa:

"Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan."

Ayat (4) menyatakan bahwa:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah."

B. Tinjauan dalam Undang-undang Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa:

"Dalam undang-undang ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinya hubungan perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan."

Dalam hal ini, undang-undang memperjelas mengenai *coorporate social responsibility*, agar perseroan dapat menciptakan kondisi yang baik.

2.1.6 Hubungan Tingkat *Leverage* Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure.*

Tingkat *leverage* dalam perusahaan haruslah dijaga keseimbangannya agar perusahaan dalam melakukan operasi dapat berjalan dengan baik. *Leverage* yang juga merupakan hutang ini adalah merupakan faktor yang penting bagi perusahaan. Tetapi apabila akan mememberikan dampak risiko yang besar bagi perusahaan.

Jumlah hutang yang melebihi asset akan memberikan dampak buruk bagi pengelolaan perusahaan oleh karena itu, pembiayaan perusahaan harus mempunyai *control* agar tetap berada pada batas yang normal.

Adanya *control* tersebut akan memudahkan perusahaan dalam bertangungjawab kepada para *stakeholders, debtholders,* pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan ini akan berkelanjutan kepada pertangungjawaban kepada masyarakat sebagai pihak ketiga. Selanjutnya, pertanggungjawaban ini biasa dikenal dengan *corporate social responsibility disclosure.* Hal ini di perkuat dengan pendapat Frederick D.S.Choi dan Gray K Meek (2006;201-202) yaitu sebagai berikut:

> "Perusahaan semakin dituntut untuk menunjukan rasa tangungjawab kepada sekelompok besar yang disebut sebagai pihak-pihak yang berkepentingan, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, kelompok aktivis dan masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap hal-hal selain kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi."

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban ini merupakan suatu acuan dalam melihat perusahaan membangun kepercayaan kepada

semua pihak dan menciptakan nilai ekonomi serta tidak mengabaikan unsur-unsur yang dapat menggangu lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu Undang-undang No. 25 Pasal 15 Tahun 2007 tentang Penananaman modal menjelaskan sebagai berikut:

> "Setiap penanaman modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat."

Adanya undang-undang tersebut perusahaan tentu berkewajiban dalam melaksanakan prinsip tata kelola yang baik, artinya perusahaan harus melihat berbagai aspek yang dapat menimbulkan kerugian baik lingkungan maupun sosial agar dapat berintregasi dengan masyarakat sekitar.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

2.2.1 Kerangka Pemikiran

Dengan adanya perkembangan yang pesat dalam bidang ekonomi maka, Bursa Efek Indonesia memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sebagai entitas yang terpenting dalam perekonomian, membuat semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, diharuskan berpacu untuk terus meningkatkan kualitas perusahaan.

Perusahaan yang terdaftar *(listing)* di Bursa Efek Indonesia sering disebut dengan perusahaan yang telah *go public*. Artinya perusahaan tersebut harus memberikan dan menyajikan informasi keuangan maupun non keuangan yang relevan dengan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Salah satu persiapan perusahaan yang akan *go public* adalah kesiapan semua unsur yang terkait dalam perusahaan termasuk unsur data keuangan yaitu berupa laporan keuangan. Pentingnya laporan keuangan dalam menggambarkan keadaan perusahaan sehingga menurut Sofyan Syafri Harahap (2008;105) menyatakan bahwa:

> "Laporan Keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi perusahaan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan sarana informasi atau (screen) bagi analis dalam proses pengambilan keputusan."

Dalam laporan keuangan ini berisi berbagai informasi keuangan salah satunya yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Isi dari laporan keuangan adalah neraca, laba rugi, perubahan modal (ekuitas) dan catatan

atas laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002;2) menyatakan sebagai berikut:

> "Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian intergral dari laporan".

Neraca dalam laporan keuangan memberikan informasi yaitu berupa informasi hutang. Hutang merupakan bagian dari kewajiban yang terdapat dalam laporan keuangan. Seperti menurut (www.investopedia.com/term/1/leverage.asp) menyatakan bahwa:

> "Sebuah perusahaan dengan signifikan lebih banyak hutang daripada ekiutas adalah dianggap sangat *leverage*."

Dalam menentukan tinggi rendahnya hutang perusahaan yang digambarkan dengan tingkat leverage maka diperlukan alat analisis berupa rasio. Menurut Darsono dan Ashari (2005;76) mentakan bahwa

> "Leverage merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang jika perusahaan tersebut dilikuidasi dan menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang."

Dari hal diatas maka perusahaan harus membuat keseimbangan antara kekayaan yang dimiliki berupa aset dengan hutang yang dimiliki. Dengan melakukan penyeimbangan maka, dengan sendirinya perusahaan terus melakukan *control* terhadap tinggi rendahnya hutang berada pada titik keseimbangan untuk

mengantisispasi perusahaan terhadap kendala yang muncul dari perjanjian hutang. Seperti yang dikemukan oleh Belkaoui (2000) menyatakan bahwa:

> "semakin tinggi rasio hutang/ekuitas suatu perusahaan yang equivalen dengan semakin dekatnya (yaitu semakin ketat) perusahaan terhadap kendala-kendala dalam perjanjian hutang dan semakin besar pelanggaran perjanjian, semakin mungkin manajemen menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan *income*."

Adanya hutang yang tinggi dan pembiayaan yang cenderung dengan menggunakan hutang serta pengelolaan yang tidak baik oleh manajemn perusahaan maka, dapat menciptakan masalah baru bagi informasi yang dihasilkan. Para pemilik modal, *debtholders*, akan melakukan analisa keuangan yang menjadi pembiayaan mereka sehingga menyebabkan terganggunya perusahaan dalam mendapatkan sumber dana. Oleh karena itu, apabila perusahaan melakukan peningkatan *income* dalam suatu laporan keuangan, akan menyebabkan informasi yang di hasilkan berbeda dengan keadaan sebenarnya. Ketika peningkatan tersebut dilakukan dengan pengurangan berbagai biaya atau memperkecil biaya agar menyebabkan *income* naik, menyebabkan perusahaan dapat menjadi sorotan bagi para penyedia dana.

Dari hal tersebut diatas maka, maka pertanggungjawaban sosial diperlukan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini adalah, *stakeholders* dan juga *debtholders*. Selain itu, dalam menjalankan *corporate social resposibility* terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan. Biaya menurut Hansen dan Mowen, (2000;38) biaya adalah

> "Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa datang untuk organisasi."

Adapun kebijakan perusahaan pengungkapan kewajiban yang dicatat untuk biaya lingkungan. Menurut Donald E Kieso, Jerry J Weygand dan Ferry D Warfield (2002;205) adalah sebagai berikut:

> "Mengakrualkan biaya lingkungan dan pembersihan terkait yang bersifat nonmodal apabila mungkin kewajiban akan terjadi dan jumlahnya dapat diestimasi secara layak."

Dengan adanya hal diatas maka perusahaan bertanggung jawab terhadap ekonomi tidak hanya dengan maksimalisasi laba tetapi kepada pihak yang memberikan pinjaman termasuk *debthoders*. Menurut Ismail Solihin (2009; 3) menyatakan bahwa:

> "Perusahaan korporasi juga memiliki tanggung jawab ekonomi kepada para kreditor yang telah menyediakan pinjaman bagi perusahaan. Dalam hal ini perusahaan korporasi memiliki tanggung jawab dalam bentuk menyisihkan sebagian kas untuk membayar cicilan pokok pinjaman."

Teori ini menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak yang menyediakan pinjaman dalam hal ini yang memiliki tagihan kepada pihak peminjam

Lebih luasnya pertanggungjawaban sosial ini berkelanjutan kepada masyarakat (sosial). Menurut Pearce dan Robinson dengan alih bahasa kiroyan (2006;54) *corporate social responsibility* adalah sebagai berikut:

> "Konsep bahwa perusahaan harus melayani masyarakat sosial sebaik memberikan keuntungan financial kepada pemegang saham dan harus berkelanjutan secara terus menerus yang pada akhirnya para manajer akan menyadari bahwa keputusan untuk menerapkan *corporate social responsibility* adalah keputusan yang sangat penting dalam perencanaan strategis."

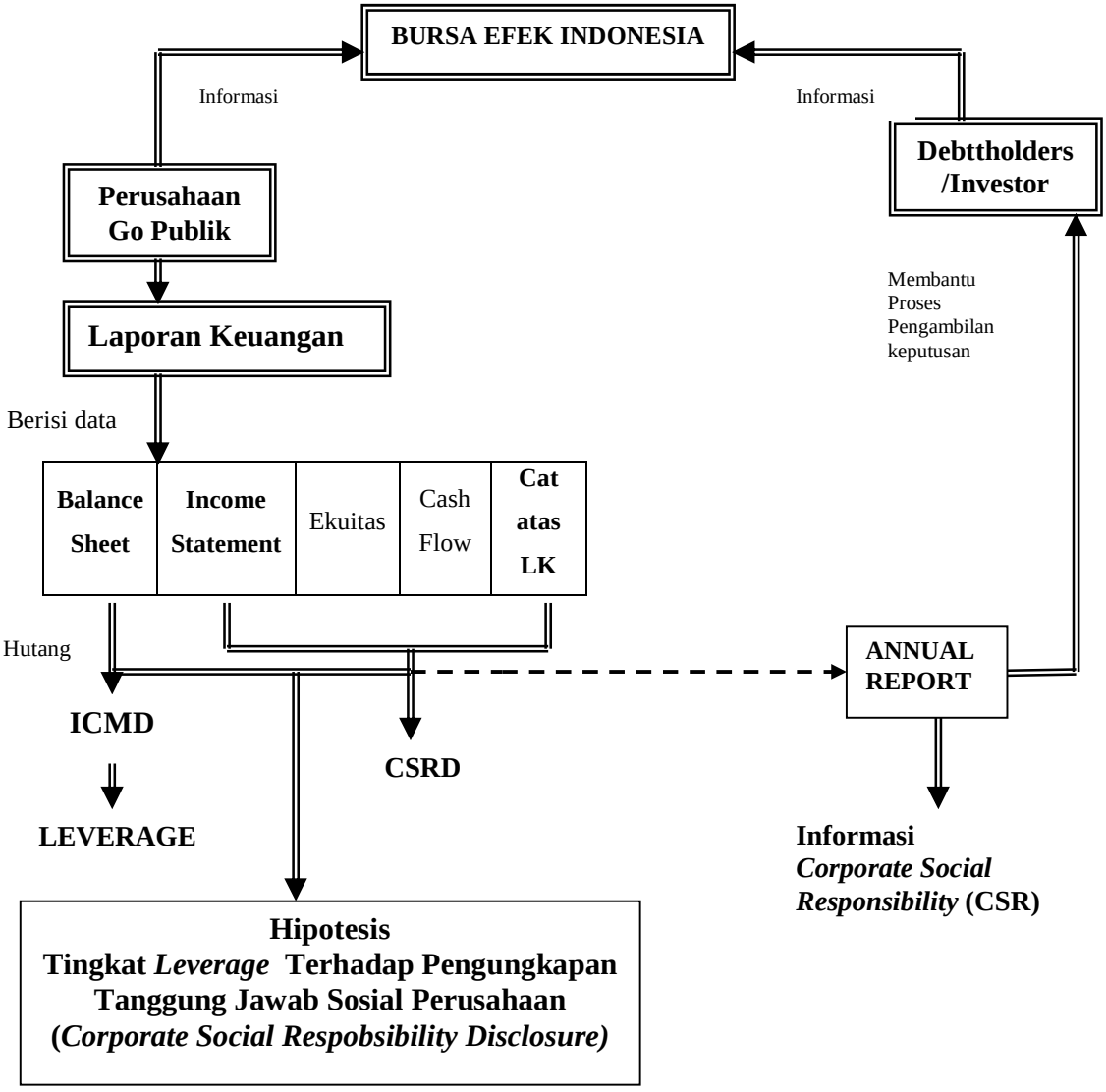
Dan dari kedua teori tersebut selain menekankan adanya pengembalian terhadap pinjaman karena merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap *debtholders* atau pihak yang memiliki tagihan maka ada juga pertanggungjawaban terhadap masyarakat (sosial). Karena hal tesebut maka teori tersebut didukung dengan teori Eddy Rismanda Sembiring, Jurnal MAKSI vol 6 No.1. 2006, menyatakan bahwa:

> "Manajemen perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*."

Adanya teori diatas memperjelas mengenai *leverage* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Gambar 2.1

Skema Kerangka Berpikir



2.2.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dari hal itu maka, penulis hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesi asosiatif. Hipotesis asosiatif menurut Sugiyono (2010;89) adalah sebagai berikut:

> "Suatu pernyataan yang menunjukan dugaan tentang hubungan antar dua variable atau lebih."

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik suatu hipotesis yaitu analisis tingkat *leverage* berdampak pada *corporate social responsibility disclosure*.